

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL PADA PASAR CEMPAKA KOTA BANJARBARU

Camelia, Deli Anhar, Junaidy

Administrasi Publik, 63201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia 17.12.0095

Administrasi Publik, 63201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia 17.12.0095

Administrasi Publik, 63201, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia 17.12.0095

Email : [camelidutz04@gmail.com](mailto:camelidutz04@gmail.com)

Tlp : 0813 4539 9916

## ABSTRAK

Camelia 17120095 “ Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Pada Pasar Cempaka Kota Banjarbaru” Bimbingan Bapak Deli Anhar sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Junaidy sebagai Co Pembimbing.

*This study aims to determine and describe the implementation of public service policies in the Cempaka market arrangement in Banjarbaru City seen from the standard theory of Policy Implementation according to Van Meter (in Winarno 2012:155), namely the Basic Measures and Policy Objectives, Policy Sources (Human Resources), Facilities and Infrastructure Resources, Disposition (Employee Attitudes) and the Social, Economic and Political Environment. The research method used is descriptive qualitative. There are 5 informants. Sources of data used are primary data obtained directly from informants, documents related to the problem to be studied. The results show that the implementation of policies in market management has not been carried out 100 percent apart from the lack of traders obeying the rules and the small number of staff in the Banjarbaru City Trade office, making it difficult to control activities in the Cempaka market. Implementors who accept the implementation of public service policies, both from the Banjarbaru City Trade Office, traders and the community also accept, This cannot be implemented properly because they accept the policy but do not implement the regulations that have been made. The social, economic and political environment are also important factors in the successful implementation of traditional market structuring policies.*

*Keywords: Policy Implementation, Cempaka Traditional Market Arrangement*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut berbagai aspek kehidupan yang luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki kapasitas memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perekonomian.

Tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia melalui pelayanan publik merupakan kewajiban untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat Indonesia dapat merasakan hidup makmur dan sejahtera. Namun hingga saat ini masih banyak permasalahan terkait pelayanan dan hal ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Untuk mendorong tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap peningkatan kualitas pelayanan, maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Namun hingga kini masyarakat masih menganggap bahwa kualitas pelayanan masih sangat rendah, terutama masalah administrasi. Berbagai persoalan muncul dari masalah administrasi hingga sumber daya manusia yang kini masih belum menguasai bidang tersebut. Salah satu substansi yang langsung bersaing dalam persaingan finansial adalah pasar tradisional.

Sektor Usaha adat di Indonesia yaitu pasar tradisional merupakan salah satu bidang yang memiliki situasi penting dalam perbaikan keuangan di Indonesia, selain itu juga karena pasar tersebut masih merupakan tempat utama bagi penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pedagang barang kerajinan tangan, dan produk industri rumah tangga (industri rakyat). Di dalam pasar terjadi suatu kegiatan komunikasi dan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki kapasitas penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Selain itu pasar juga merupakan tempat hiburan, membuka lapangan pekerjaan dan berbelanja. Pasar Tradisional adalah jenis pasar asli, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, sayur, ikan, daging, dan lainnya.

Sementara yang kita ketahui pasar tradisional diberbagai titik yang masih jauh dari sebutan “kota besar” merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk membantu kelangsungan hidup dan perekonomian masyarakat. Adanya proses jual beli di Pasar Tradisional jelas memiliki sisi negatif dan sisi positif seperti sebagian pasar tradisional di Indonesia yang tampak terlihat kumuh, semrawut, kotor, bau dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.

Salah satunya adalah pasar cempaka yang berada di kota banjarbaru diaman keberadaan pasarnya terlihat kumuh, dagangannya kurang bersih dan rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya, serta kurangnya masyarakat mematuhi terhadap peraturan yang sudah dibuat untuk pasar tersebut. Hal ini dikarenakan penataan pasar kurang diperhatikan atau dibiarkan begitu saja, kemudian ketidak tertibannya pedagang yang berjualan di pinggiran jalan masuk pasar tradisional, juga kurangnya jalan efektif di pasar cempaka. Namun, dengan pelaksanaan pemerintah sendiri, membuka peluang bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan pasar tradisional yang tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perbaikan pasar tradisional memang perlu dilakukan, berdasarkan dari pasal 33 dalam UUD 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Dengan demikian, untuk dapat mengelola dan mengembangkan pasar tradisional perlu dibuat adanya kebijakan perbaikan pasar yang sesuai dengan komponen internal dan eksternal.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional di Pasar Cempaka Kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui dampak dalam implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional di Pasar Cempaka Kota Banjarbaru.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Implementasi

Implementasi adalah interaksi yang kuat yang mencakup upaya tanpa henti untuk menemukan apa yang akan dan harus mungkin. Dengan cara ini eksekusi mengelola latihan yang mengarah pada

pengaturan program ke tujuan pendekatan yang ideal.

Menurut Jenkis (dalam Parsons, 2005:463) Execution study adalah penyelidikan kemajuan, yang mencakup: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana peluang kemajuan dapat ditingkatkan. Demikian pula penyelidikan terhadap struktur mikro kehidupan politik; bagaimana asosiasi di luar dan di dalam kerangka politik mengarahkan masalah mereka dan terhubung satu sama lain; apa inspirasi mereka untuk bertindak seperti itu, dan apa inspirasi yang berbeda untuk berbagai kegiatan. Eksekusi adalah cara untuk mengubah pengaturan menjadi pelatihan yang secara teratur dilihat sebagai siklus yang penuh dengan substansi politik di mana mereka yang tertarik untuk mencoba mempengaruhinya sebanyak yang dapat diharapkan untuk mencapai tujuan penting. (Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo, 2006:81).

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam pendekatan. Tahap ini memutuskan apakah strategi yang dianut oleh otoritas publik benar-benar relevan di lapangan dan efektif dalam memberikan hasil dan hasil sebagaimana diatur. Hasil biasanya dapat dilihat dalam jangka waktu singkat setelah eksekusi kesepakatan. Hasil biasanya diperkirakan setelah hasil disampaikan atau cukup lama setelah pelaksanaan pengaturan (Indiahono: 2009:143) Pemeriksaan pelaksanaan strategi tidak sama dengan apa yang pada umumnya disebut "penilaian strategi". Penilaian strategi adalah perangkat yang berkembang pesat dan penting bagi para pemimpin.

Pada dasarnya, ini membandingkan target dan hasil program, yang mengukur efek proyek seperti peningkatan di sekolah, pekerjaan, penggunaan narkoba kronis, atau penyakit yang dapat diubah menjadi strategi dengan tujuan ini (tangkilisan: 2003:9) James Anderson 1979 mengatakan Strategi eksekusi/ program penting untuk interaksi regulasi (siklus otoritatif). Siklus manajerial seperti yang disebut oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan rencana atau pelaksanaan kerangka otoritatif yang terjadi kapan saja.

Interaksi manajerial memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan, substansi dan efek suatu pendekatan (dalam Kusumsnegara: 2010: 97). Mengenai pelaksanaan suatu pendekatan, sebenarnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sejak strategi itu dibentuk dan selama waktu yang dihabiskan untuk memutuskannya.

Jalan menuju pelaksanaan (eksekusi strategi) merupakan suatu siklus yang panjang dan luas untuk mencapai sasaran-sasaran pengaturan terhadap individu, dan individu ini memiliki sifat

mencipta dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang pula. Dalam melakukan pendekatan pemerintah, jenis latihan individu yang didorong adalah investasi penduduk yang sebenarnya merupakan kebutuhan yang signifikan dan penting untuk pelaksanaan otoritas publik yang bermanfaat

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamsud.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai 'whatever government choose to do or not to do'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga lembaga sukarela lainnya memiliki

kebijakan-kebijakan pula. Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

### **Pelayanan Publik**

Pada dasarnya setiap orang membutuhkan administrasi, bahkan secara keterlaluhan cenderung dikatakan bahwa pertolongan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Budiman Rusli berpendapat bahwa bantuan sebagaimana dimaksud olehnya sesuai dengan hipotesis siklus keberadaan otoritas (LCTL) bahwa menjelang awal kehidupan manusia (bayi baru lahir) administrasi sebenarnya sangat tinggi, namun seiring bertambahnya usia administrasi yang dibutuhkan akan berkurang. Bantuan publik dicirikan sebagai menawarkan jenis bantuan (melayani) kebutuhan individu atau jaringan yang memiliki kepentingan dalam asosiasi sesuai dengan standar dan teknik penting yang telah ditetapkan. Bantuan publik adalah pemuasan keinginan dan kebutuhan daerah oleh pimpinan negara. Administrasi adalah suatu cara melayani, membantu, merencanakan, dan mengawasi, menyelesaikan keperluan, keperluan seseorang atau perkumpulan orang-orang, mengandung arti bahwa barang-barang yang dilayani adalah orang-orang, orang-orang, dan perkumpulan-perkumpulan berjenjang (Sanipar, 1998), sedangkan masyarakat umum dapat diartikan sebagai daerah setempat atau individu (Ahmad Ainur, 1998). Rohman, 2010: 25).

Administrasi adalah suatu bentuk gerakan administrasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah baik di tingkat menengah, di daerah, BUMN, dan BUMD sebagai tenaga kerja dan produk dalam menangani kebutuhan daerah setempat sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang bergantung pada KEPMENPAN 81/93 ( dalam Tjandra: 2005: 9) Administrasi publik adalah semua latihan bantuan yang dilakukan oleh koperasi spesialis terbuka sebagai pekerjaan untuk memenuhi persyaratan penerima manfaat administrasi seperti halnya pelaksanaan pengaturan undang-undang dan pedoman yang bergantung pada KEPMENPAN 81/93 (dalam Tjandra :2005:9) Ide kontrak residen mulai terlihat setelah kenyataan. .

Masyarakat pada umumnya dalam sanksi residen dapat memberikan permintaan yang objektif untuk membangun pemenuhan publik dengan administrasi yang diberikan oleh otoritas publik. Otoritas publik juga ditawarkan kesempatan untuk memberikan data yang jelas tentang sistem dan strategi bantuan. Kontrak residen membuka keadaan yang menjanjikan untuk pertukaran antara otoritas

publik dan publik sehingga kedua pemain mengetahui kendala kedua pemain, mencari pengaturan dan memberikan yang terbaik untuk mendukung perbaikan, Indiahoo, 2006 (dalam Indiahono: 2009:161) Sinambela , et al (2011:5) berpendapat "Bantuan publik dicirikan sebagai "menawarkan jenis bantuan (melayani) persyaratan individu atau jaringan yang memiliki minat dalam asosiasi tertentu sesuai standar penting dan teknik pengaturan".

### **Pasar Tradisional**

Pengertian pasar secara sempit adalah adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi.<sup>1</sup> Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.

Pengertian lain tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. pasar dapat juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>2</sup> Pasar merupakan tempat dimana pembeli dan penjual bertemu dan berfungsi, barang atau jasa tersedia untuk dijual, dan terjadi perpindahan hak milik. Sedangkan definisi yang kedua menyatakan bahwa, pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-pembeli potensial. Dalam definisi yang pertama terdapat suatu keadaan dan kekuatan tertentu yang dapat menentukan harga, yaitu bertemunya pembeli dan penjual dengan fungsi yang mereka lakukan masing-masing. Istilah pasar pada definisi yang kedua sering ditukarkan dengan istilah permintaan, bahkan sering pula dipakai secara bersama-sama sebagai permintaan pasar (market demand).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian ini muncul karena adanya perubahan paradigma sehingga dapat dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Yusuf (2014:31) Metode ini bertujuan unyuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu yang sedang berlangsungnya proses penelitian. Metode penelitian ini dapat digunakan

dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Adapun memberikan informasi yang muktakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah.

Di dalam penelitian deskriptif tidak terbatas dalam mengumpulkan data saja tetapi juga menganalisis dan interpretasi dari data itu cenderung mencari dan menerangkan saling berkesinambungan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi terkait ukuran dasar dan tujuan kebijakan (sasaran kebijakan), sumber-sumber kebijakan (sumber daya), komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (komunikasi), karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi (sikap para pelaksana).

### **Definisi Operasional**

Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang akan menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Terdapat lima dimensi dalam mengukur kualitas pelayanan, yaitu: Tangibel (Berwujud) Reliability (Keandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati).

### **Subyek Penelitian**

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "sosial situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam "apa yang terjadi" di dalamnya. Penelitian kualitatif deskriptif memerlukan informan kunci yang akan mendukung data peneliti.

Menurut Spradley Informan kunci (key informant) adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki informasi pokok tertentu. Informasi kunci akan menjadi sumber fenomena tersebut Menurut Nasution dalam penelitian Kualitatif yang dijadikan informan hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Informan dapat berupa peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sering informan dipilih secara "purposive" bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu. Sering pula responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi kemudian responden ini diminta pula menunjuk orang lain dan seterusnya. Cara ini lazim disebut "snowball

sampling" yang dilakukan secara serial atau berurutan.

### **Teknik Analisis Data**

Pada analisis data kualitatif, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, Reduksi data melihat pada proses pemilihan, pemokusian, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung.
- b. Penyajian Data, Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara khusus atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah naratif.
- c. Penarikan kesimpulan, Kesimpulan muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.

### **Keabsahan Data**

#### **1. Kepercayaan (kreadibility)**

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

##### **a. Triangulasi**

Triangulasi yakni peneliti melakukan pengecekan kebenaran data dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari responden yang lain. Sedangkan menurut Sugiyono (2012, hlmn. 372) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

##### **b. Memperpanjang Pengamatan**

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika

analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi penelitian.

### c. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian

### 2. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

### 3. Kepastian (Konfermability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audi.

### 4. Validitas Eksternal (Transferabilitas)

Menurut Emzir (2011, hlm. 70) dalam penelitian kualitatif atau sering disebut penelitian naturalistic, transferabilitas dapat diartikan sejauh mana hasil penelitian yang diungkapkan dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Hal senada ini juga diungkapkan oleh Sugiyono (2012, hlm. 376) bahwa transferabilitas adalah sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

## HASIL PENELITIAN

### Pembahasan

Dalam melakukan analisis peneliti menggunakan 4 indikator dari implementasi kebijakan melalui variabel-variabel yang telah dibuat penulis sebelumnya sehingga analisis data yang dilakukan penulis dapat dibuat dengan rinci.

#### 1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan (Sasaran kebijakan)

Sasaran kebijakan adalah acuan atau pegangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang didasarkan pada kepentingan utama terhadap sistem-sistem yang menentukan pencapaian kebijakan. Oleh karena itulah, ukuran dasar dan tujuan kebijakan itu merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan sebagai bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam mewujudkan standar dan

sasaran, dan orang yang terlibat dalam suatu kebijakan. Sasaran kebijakan yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari masalah dalam pengimplementasiannya.

Ukuran dasar dalam Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka berguna untuk menguraikan tujuan keputusan secara menyeluruh karena kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran memang sesuai di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan.

Dengan adanya Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka sasarannya yang pertama untuk meningkatkan perekonomian pedagang pasar cempaka, yang kedua supaya pedagang tidak sembarangan untuk berjualan di badan pasar cempaka karena jika masyarakat berjualan di badan pasar maka pasar cempaka akan mengalami kemacetan.

Dalam hal melakukan penataan pasar implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar cempaka sudah seharusnya dilakukan dimana yang menjadi sasaran kebijakan ini ialah semua pedagang yang berjualan di pasar cempaka. Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka memang sangat bagus diterapkan sesuai sasaran kebijakan yang ada, supaya Pasar cempaka layak disebut sebagai pasar.

Berkaitan dengan sasaran kebijakan Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka pemenuhan ukuran dasar dalam penataan Pasar Tradisional Cempaka belum memenuhi standar sasaran kebijakan dimana letak Pasar Cempaka lokasinya kurang strategis karena berada di sekeliling pemukiman masyarakat, melihat kondisi banyaknya masyarakat yang datang berbelanja ke Pasar Cempaka menurut peneliti Pasar Cempaka perlu di relokasi karena daya tampung pasar terhadap masyarakat disana menjadi salah satu kendala dalam penataan pasar cempaka, para pedagang juga sembarangan berjualan di tempat yang sudah dilarang.

Berkaitan dengan kualitas penataan pasar tradisional cempaka, masih sangat jauh dari ukuran dan tujuan kebijakan karena faktor yang terjadi di atas. Atas dasar itu peneliti melihat bahwa Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka, belum sesuai dengan sasaran kebijakan untuk itu diharapkan kerjasama dari semua pihak baik itu elemen pemerintah, aparat, maupun pedagang untuk keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka.

Dari uraian hasil penelitian, standar dari kebijakan penataan pasar tradisional di cempaka yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sesuai dengan peraturan di atas diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Pasar Cempaka dari sisi fisik dan non fisik di wilayah cempaka kota Banjarbaru. Sehingga akan memberikan dampak meningkatkan kembali minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Cempaka. Akan tetapi kenyataan di lokasi Pasar Cempaka belum menjalankan peraturan. Sasaran dari kebijakan ini yaitu menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah, menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Namun, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai karena masih banyaknya keluhan-keluhan baik dari pedagang, pembeli dan masyarakat di Pasar Cempaka mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar yang masih kurang baik. Diharapkan pengelola Pasar Cempaka dapat melaksanakan sasaran yang sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari kebijakan ini tercapai secara maksimal.

## 2. Sumber kebijakan (Sumber Daya)

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Sumber daya adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dana atau perangsang yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif, oleh karena itu pihak dinas harus melihat bagaimana sumber daya yang sudah tersedia untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

### a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Demikian juga halnya dengan Staf merupakan sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan atau program. Kurangnya staf pelaksana akan menghambat jalannya suatu kebijakan sehingga implementasi kebijakan yang dilakukan tidak maksimal. Tetapi jika jumlah staf

nya juga banyak tidak memungkinkan bahwa implementasi itu akan berhasil. Namun disisi lain kekurangan staf akan menimbulkan persoalan menyangkut implementasi kebijakan yang baik.

Kesiapan sumber daya sudah siap melaksanakan Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka, tetapi karena adanya faktor yang menghambat terelealisasinya kebijakan dimana peneliti melihat bahwa tidak teraturnya lokasi para pedagang dan berjualan di badan pasar mengakibatkan mempersulit petugas UPT Pasar dalam mengatur pedagang. Ketika pedagang susah diatur dan tidak mau menuruti peraturan terpaksa UPT Pasar melibatkan polsek dan dishub untuk membantu dalam pengaturan.

### b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di pasar cempaka masih sangat jauh dari standar yang ada, dari standar berdirinya pasar yang peneliti baca pasar cempaka belum layak di jadikan sebagai pasar melihat sarana dan prasarana yang seharusnya ada. Di pasar cempaka hanya tersedia MCK(kamar mandi), gedung, kios, sedangkan untuk studi kelayakan pasar seharusnya ada hidrant mengatasi jika terjadi kebakaran karena pasar identik dengan kebakaran, lokasi parkir juga harus disediakan supaya pasar tertata dengan rapi dan tidak semrawut, tempat bersalin juga harus disediakan dimana jika pedagang yang sedang hamil mau melahirkan, ada tempat penitipan barang dan tempat sholat. Jadi sarana maupun prasarana di cempakamasih belum memadai.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Dari uraian hasil penelitian di atas peneliti mengamati mengenai sumber daya yang mendukung proses implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di cempaka. Bagi para penyelenggara pemerintah khususnya Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang berkehendak menyetatkan tindakan dan kebijaksanaan dengan tatanan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka aparat birokrasi haruslah sensitive, responsive dan akuntabel. Sensitivitas dan responsibilitas pada dasarnya merupakan wujud sikap tanggung jawab aparat birokrasi terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini sumber daya manusia yang dibutuhkan belum memadai dan pengelola pasar tidak sensitif dalam melihat ketersediaan fasilitas

kurang yang dimiliki oleh Pasar Cempaka. Tidak tanggap terhadap setiap keluhan-keluhan yang disampaikan dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban.

### 3. Disposisi (Sikap para pelaksana)

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Sikap atau disposisi implementor mencakup respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam melaksanakan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan kapasitas demi keberhasilan kebijakan tersebut.

Kemampuan implementor menunjukkan potensi untuk melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Kalau disebut potensi, maka kemampuan dapat juga dipergunakan untuk menunjukkan apa yang akan dapat dikerjakan oleh seseorang, bukan apa yang telah dikerjakan oleh seseorang. Implementor sebagai unsur pelaksana kebijakan memegang peranan penting terhadap keberlangsungan organisasi. Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang maksimal, pemerintah dituntut lebih tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas tersebut harus sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Dalam hal ini minat dan ketertarikan terhadap tugas, tingkat kemauan memahami uraian tugas, pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pengelola Pasar Cempaka harus memahami persoalan-persoalan dan kebutuhan yang dihadapi pedagang dan pengunjung pasar seperti, penambahan fasilitas pasar yang belum terpenuhi dan perbaikan fisik pasar belum maksimal ditandai dengan banyaknya kios yang hancur, kebersihan pasar yang tidak terjaga, dan penyalahgunaan fungsi badan jalan oleh pedagang kaki lima dan juru parkir.

Dan bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Diharapkan pengelola Pasar Cempaka lebih responsif dalam menanggapi setiap keluhan yang disampaikan oleh pedagang dan masyarakat, serta tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan pedagang pasar.

Dalam hal ini kecenderungan sikap maupun pemahaman yang dimiliki oleh implementor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan melalui 3 hal yaitu : kognisi (komprehensi, pemahaman) tantangan kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan

identitas tanggapan itu. Pemahaman pelaksana perlu karena implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

### 4. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi masyarakat yang memiliki beragam etnis dan karakteristik yang berbeda tentu tidak hanya menyimpan potensi keunggulan namun juga dapat menjadi suatu ancaman bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban. Faktor sosial, politik dan ekonomi juga dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dicapai apabila masyarakat ikut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses implementasinya.

Kesadaran dari masyarakat akan adanya kebijakan dan mematuhi setiap aturannya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam mendukung pengimplementasian kebijakan penataan pasar tradisional ini perlu memperhatikan lingkungan sosial ekonomi. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sosio-kultural yakni menerima pasar sebagai bagian dari aktivitas sosial dengan konsekuensi bahwa kebiasaan dan tradisi beradaptasi dengan para pelaku pasar.

Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap keberadaan pasar akan menentukan keberlangsungan pasar, demikian pula adanya dukungan atau gangguan masyarakat juga besar akan berpengaruh terhadap eksistensi pasar. Dukungan masyarakat terhadap pasar dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk diantaranya ikut serta menjaga atau memelihara ketertiban dan keamanan pasar.

Namun fakta di lapangan hasil dari observasi pedagang Pasar Cempaka masih belum bisa menjaga kebersihan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya pedagang yang membiarkan sampah sisa berjualan di lantai pasar dan di badan-badan jalan. Begitu juga dengan masyarakat di sekitar Pasar Cempaka yang ikut membuang sampah di badan-badan jalan pasar, tidak langsung ke tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan.

Dukungan yang lebih penting dari masyarakat terhadap Pasar Cempaka adalah peran masyarakat dalam menghidupkan aktivitas pasar yang diwujudkan dengan minat berbelanja. Meskipun kondisi pasar aman, tertib dan bersih akan tetapi jika tidak ada minat masyarakat untuk berbelanja, maka pasar akan kehilangan fungsinya.

Berbicara tentang pasar tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi karena pasar mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Dalam kaitan ini pasar tradisional sebagai salah satu penggerak



ekonomi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM yang merupakan segmen utama pasar tradisional besar perannya dalam membuka lapangan kerja secara luas dan menciptakan pendapatan bagi sebagian besar pekerja berpendapatan rendah. Memperhatikan hal-hal di atas, maka penataan dan pengembangan Pasar Cempaka merupakan kebijakan yang sangat diperlukan guna menumbuh kembangkan perdagangan khususnya bagi pedagang kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya. Maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian di lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penataan Pasar Tradisional cempaka kota Banjarbaru.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan Pasar Tradisional Cempaka pemenuhan ukuran dasar dalam penataan Pasar Tradisional Cempaka belum memenuhi standar sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya, Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penataan Pasar Cempaka Kota Banjarbaru sejauh ini Dinas Perdagangan dan UPT Pasar sudah mengupayakan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Hanya saja kendala dalam ketersediaan staf yang handal untuk pelaksanaan kebijakan sumber daya belum memadai.

3. Disposisi (Sikap Para Pelaksana), meskipun dari Dinas sendiri menerima adanya Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan Pasar Tradisional Cempaka dan masyarakat juga menerima, Hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat menerima kebijakan itu tetapi tidak melaksanakan peraturan yang telah dibuat.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka adalah:

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan (Sasaran Kebijakan), Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka belum sesuai dengan sasaran kebijakan untuk itu diharapkan kerjasama dari semua pihak baik itu elemen pemerintah, aparat, maupun pedagang untuk keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka.

2. Sumber Daya, berkaitan dengan sumber daya dalam Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan Pasar Tradisional Cempaka perlu ditingkatkan lagi baik sumber daya manusia, finansial maupun sarana dan prasarana.

3. Disposisi (Sikap Para Pelaksana) pelaksana harus lebih menunjukkan dukungannya atas implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional cempaka untuk keberhasilannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Emzir, 2016. Analisis Data. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Kerlinger, 2006. *Asas-asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
2. Hanif Harul, Gustomy Rachmad & dkk, 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM
3. Moenir, H.A.S, 2002. *Manajemen pelayanan umum di indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
4. Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta \
5. SD H Soekarno, 2000. *Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
6. Suyanto, Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Group
7. Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
8. Yusuf, Muri . 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : Prenada Media Group